



Tantangan dan Strategi Pengelolaan Desa Wisata: Perspektif Peserta Pelatihan Pariwisata

Ilham Junaid*

Politeknik Pariwisata Makassar

Korespondensi Email: illank77@yahoo.co.id

Abstrak

Latar Belakang:

Peserta pelatihan pariwisata adalah *stakeholder* pariwisata yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan tantangan atau hambatan pengelolaan desa wisata berdasarkan pandangan peserta pelatihan pariwisata; 2) mengusulkan strategi pengelolaan desa wisata. Penelitian ini memanfaatkan teori institusi (*institutional theory*) dalam menganalisis pandangan peserta pelatihan pariwisata.

Metodologi:

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dari peserta pelatihan pariwisata melalui aplikasi WhatsApp dan secara daring (*zoom meeting*). Penulis sebagai fasilitator pada pelatihan pariwisata dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Data kualitatif dianalisis dengan prinsip analisis data kualitatif, yakni, reduksi data, klasifikasi dan interpretasi dengan mengacu pada teori institusi dan data-data tematik penelitian.

Temuan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal kelembagaan, rendahnya kualitas SDM dan kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran dan legalitas kelembagaan adalah tantangan yang dihadapi oleh lembaga pariwisata (Pokdarwis) dalam mengelola desa wisata. Penelitian ini mengusulkan strategi pengelolaan desa wisata, yakni, 1) pembentukan kelembagaan lokal; 2) penerapan kepemimpinan efektif bidang pariwisata oleh tokoh (pemimpin) Lembaga/organisasi; 3) penguatan sinergi *stakeholder*; 4) pengelolaan desa melalui prinsip pemenuhan kebutuhan wisatawan; 5) peningkatan kapasitas anggota Pokdarwis dalam mengelola sumber daya pariwisata.

Kesimpulan:

Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan (*institutional theory*) bahwa lembaga di suatu destinasi pariwisata akan dapat berjalan dengan baik melalui peran bersama dari *stakeholder* yang ada di perdesaan.

Kata kunci: *desa wisata; pengelolaan desa wisata; pelatihan pariwisata; teori institusi (kelembagaan); wisata perdesaan*

DOI	:	https://doi.org/10.55701/mandalika.v2i2.87
Diterima	:	5 Juni 2023
Diterima	:	26 Juli 2023
Diterbitkan	:	31 Agustus 2023
Pemberitahuan Hak Cipta	:	<p>Penulis mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan kepenulisan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.</p> 

PENGANTAR

Pengelolaan desa wisata telah menjadi pilihan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mendorong dan membangun

kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan desa sebagai salah satu strategi untuk melibatkan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata diharapkan menjadi katalis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan (Andriani & Sunarta, 2015; Junaid et al., 2022; Pramusita & Sarinastiti, 2018). Kondisi masyarakat perdesaan cenderung terfokus hanya pada aspek kehidupan perdesaan, pariwisata belum menjadi media untuk membangun perdesaan. Gagasan wisata perdesaan dan desa wisata muncul seiring adanya potensi desa untuk menjadi destinasi yang selanjutnya, akan menjadi lokomotif pengembangan masyarakat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia bidang kepariwisataan. Pada tanggal 2 s/d 14 Maret 2023, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan pelatihan dasar pariwisata dengan mengundang peserta dari berbagai instansi untuk mendapatkan pelatihan kepariwisataan. Program tersebut merupakan bagian dari program kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menggandeng pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelatihan dasar pariwisata. Salah satu isu mendasar yang menjadi perhatian dalam pelatihan tersebut adalah pengelolaan desa wisata. Kebijakan pariwisata Indonesia salah satunya mengembangkan desa wisata sehingga para peserta pelatihan dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan desa wisata.

Penelitian tentang desa wisata ataupun wisata perdesaan telah menjadi perhatian akademisi baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Ragam penelitian tentang pengelolaan desa wisata di Indonesia telah menjadi kajian peneliti, misalnya, pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan desa wisata (Mumtaz & Karmilah, 2021), peran organisasi tata kelola atau kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata (Junaid & M. Salim, 2019; Prafitri & Damayanti, 2016), dampak-dampak pengelolaan desa wisata (Pramusita & Sarinastiti, 2018); pengelolaan desa wisata

berkelanjutan (Andriani & Sunarta, 2015; Ingkadijaya & Bilqis, 2020).

Dalam konteks global, penelitian tentang desa wisata sering dikaitkan dengan wisata perdesaan (*rural tourism*). Amir, et al. (2015) mengkaji konsep resiliensi masyarakat di Malaysia dalam mengembangkan pariwisata perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan berdampak pada upaya masyarakat untuk bangkit (*resilience*) dalam mengelola wisata perdesaan. Carneiro et al., (2015) meneliti tentang lansekap desa dan pengalaman wisata perdesaan di Portugal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat elemen lansekap alam yang memiliki pengaruh terhadap pengalaman wisatawan, misalnya, jenis dan warga vegetasi, *heritage* (warisan) yang dibangun dengan nuansa alamiah. Stabilitas dan kondisi yang baik adalah aspek penting dalam pengelolaan wisata perdesaan (Guaita Martínez et al., 2019). Revitalisasi perdesaan juga berdampak pada pengelolaan wisata perdesaan (Yang et al., 2021). Penelitian tentang wisata perdesaan telah memberikan kontribusi terhadap pengelolaan desa sebagai bagian dari aset pariwisata. Selanjutnya, kajian tentang desa wisata ataupun wisata perdesaan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan rekomendasi pengelolaan desa sebagai destinasi pariwisata.

Namun demikian, penelitian tentang analisis pandangan para peserta pelatihan mengenai kondisi kekinian pengelolaan desa wisata belum menjadi perhatian akademisi. Peserta pelatihan merupakan bagian dari *stakeholder* pariwisata. Perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah melibatkan berbagai *stakeholder* yang saling berkontribusi (Jamal & Stronza, 2009; Sitorus, 2020), termasuk peserta pelatihan dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki.

Para penulis pariwisata cenderung hanya terfokus pada bagaimana pandangan pengelola desa wisata sebagai sumber informasi penelitian (misalnya, Noho, 2014; Paskasari et al., 2020; Prayogi et al., 2022). Masyarakat sebagai peserta pelatihan bidang

kepariwisataan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengelolaan desa agar berdampak terhadap pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan desa wisata atau wisata perdesaan.

Desa wisata identik dengan istilah wisata perdesaan (*rural tourism*), suatu jenis wisata yang dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan. Wisatawan yang ingin mencari suasana alam dan melihat langsung kehidupan masyarakat perdesaan, maka wisata perdesaan merupakan pilihan untuk memenuhi harapan wisatawan tersebut (Guaita Martínez et al., 2019; Guerrero, 2008). Negara-negara di dunia menawarkan wilayah perdesaan sebagai salah satu destinasi yang layak menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Wilayah perdesaan dapat menjadi tempat atau lokasi untuk aktifitas rekreasi dan pariwisata (Hall et al., 2016).

Desa wisata dan wisata perdesaan memanfaatkan produk yang sama dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa, yakni suasana alam perdesaan dan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dapat memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu cara meningkatkan perekonomian mereka (Su et al., 2019). Suasana alam perdesaan dapat menjadi alasan bagi kunjungan wisatawan. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional dan suasana perdesaan mendorong industri pariwisata untuk menjadikan perdesaan sebagai agenda kunjungan bagi wisatawan. Penelitian ini menggunakan istilah desa wisata dan wisata perdesaan sebagai istilah yang memiliki makna yang sama yakni perdesaan sebagai sumber daya pariwisata (*tourism resources*).

Pengelolaan desa wisata bertujuan untuk mendorong masyarakat perdesaan memanfaatkan potensi desa untuk kepentingan mereka secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal, mendorong ekonomi kreatif, mendorong pemanfaatan produk local, dan memastikan

pemanfaatan alam perdesaan yang melestarikan lingkungan dan budaya (Sharpley, 2016). Pengelolaan desa juga menerapkan prinsip perencanaan yang terintegrasi. Duffy & Kim (2017) menggunakan istilah perencanaan terintegrasi yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan desa wisata ataupun wisata perdesaan. Proses integrasi *stakeholder* tersebut akan menghasilkan pengelolaan potensi desa yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Pengelolaan desa wisata melibatkan berbagai *stakeholder*. Terdapat berbagai lembaga (institusi) yang berperan penting dalam membangun destinasi pariwisata. Hall (2003) menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai institusi formal di berbagai tingkatan destinasi pariwisata. Pada konteks perdesaan, pemerintahan di tingkat desa adalah institusi resmi yang mengatur jalannya pemerintahan di perdesaan. Terdapat pula organisasi non-pemerintah yang dapat berkontribusi dalam pengembangan wisata perdesaan. Organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal memiliki andil dalam memajukan wisata perdesaan (Junaid & M. Salim, 2019; Junaid, 2021). Segala potensi desa dapat bermanfaat untuk masyarakat melalui peran kelembagaan lokal di perdesaan.

Lembaga atau kelembagaan adalah bagian penting yang mendukung kehidupan masyarakat, bahkan menunjang kehidupan komunitas masyarakat. Lembaga atau institusi adalah dua kata yang memiliki kesamaan makna dalam hal tujuan dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Falaster et al. (2017), istilah institusi sering digunakan sebagai makna yang sinonim dengan istilah organisasi, perusahaan atau berbagai istilah lainnya yang relevan dengan pemaknaan institusi. Institusi merupakan aturan yang dibangun secara sosial dan bersama sebagai hasil dari adanya interaksi dan negosiasi yang selanjutnya akan menjadi panduan dalam proses interaksi tersebut. Dengan kata lain, institusi akan mendorong terbentuknya rencana tindakan

dan sikap dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Scott (2014) mengemukakan bahwa teori institusi diawali dari adanya aktor yang berperan sebagai pelaku dan kejadian yang dibentuk oleh adanya tindakan dan keinginan dari masa lampau. Dengan kata lain, teori institusi merupakan bagian dari adanya teori konstruksi (*construction theory*) (Falaster et al., 2017). Upaya untuk membangun masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu *system social* yang menjadi panduan masyarakat, salah satunya dalam aktifitas kepariwisataan.

Terdapat 3 (tiga) pilar yang membentuk adanya institusi (Falaster et al., 2017; W. Scott, 2005). Sistem pertama adalah sistem regulasi, diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang mengatur para *stakeholder* yang berada dalam konteks regulasi tersebut. Sistem kedua adalah sistem normatif, diartikan sebagai suatu standar yang seharusnya menjadi acuan dalam rangka menjalankan aktifitas sesuai bidang pekerjaannya. Dalam konteks desa wisata atau wisata perdesaan, terdapat standar yang menjadi acuan jika suatu desa akan dikelola sebagai destinasi pariwisata. Pada sistem ketiga, pendekatan kultural-kognitif diartikan sebagai makna atau hasil yang memberikan makna terhadap kehidupan sosial, tindakan yang akan diambil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Teori institusi memberikan gambaran bahwa mengadopsi suatu kebijakan, strategi ataupun keputusan tidak terlepas dari adanya pertimbangan secara rasional (Soares et al., 2021). Dalam kehidupan kemasyarakatan, perlu ada alasan yang logis terhadap langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan. Dalam teori institusi, organisasi atau lembaga digambarkan sebagai sistem sosial yang dipandu oleh adanya logika secara internal dan eksternal (Soares et al., 2021). Secara internal, terdapat prosedur, skema atau aturan yang mengikat dalam suatu sistem. Secara eksternal, para *stakeholder* dalam bentuk mitra atau konsumen yang berkaitan dengan eksistensi

suatu institusi memberikan pengaruh dalam keberlanjutan suatu lembaga. Dalam teori institusi, tujuan yang hendak dicapai perlu direncanakan dengan baik, memanfaatkan teknologi kebaruan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Urgensi pendidikan dan pelatihan untuk *stakeholder* pariwisata diakui telah berdampak positif terhadap pengembangan destinasi pariwisata. Para akademisi, perencana pariwisata, industri pariwisata, pemerhati pariwisata dan masyarakat adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam membangun destinasi pariwisata. Cavaliere (2017) menguraikan contoh pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata berbasis agrowisata. Program pelatihan, seperti pembuatan pupuk kompos, proses pembuatan makanan dan minuman tradisional dan berbagai jenis pelatihan yang berkaitan dengan peluang pariwisata dapat mendorong partisipasi masyarakat (Cavaliere, 2017). Pendidikan dan pelatihan bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di perdesaan, tetapi juga *stakeholder* yang memiliki peran dalam membangun pariwisata.

Program pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan dengan berbagai metode dan strategi. Teknologi kebaruan telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi (*information technology*) untuk memudahkan proses pelatihan. Lomine (2002) mengemukakan bahwa penyampaian materi pelatihan dan penilaian hasil pelatihan telah mengalami perkembangan, teknologi telah memudahkan akademisi untuk menjalankan program pelatihan secara *online*. Pengembangan kurikulum berbasis teori dan praktik juga tidak terlepas dari proses pelatihan secara online (Elliott & Smith, 2005)). Teknologi memberikan peluang bagi *stakeholder* pariwisata untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan keterampilan di bidang pariwisata. Teknologi memungkinkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka dan online (*hybrid*).

Terdapat 4 (empat) urgensi penelitian ini. Pertama, penelitian ini menganalisis

pengelolaan desa wisata melalui pendekatan atau teori kelembagaan (*institutional theory*). Teori kelembagaan sudah diadopsi oleh peneliti pariwisata dalam menganalisis fenomena kepariwisataan. Namun, studi tentang desa wisata dalam perspektif teori institusi masih membutuhkan eksplanasi dan bukti-bukti secara empiris. Kedua, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dari para peserta pelatihan. Para peserta pelatihan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda dalam pengelolaan desa wisata. Karena itu, pandangan mereka akan sangat penting sebagai bahan kajian dalam memberikan rekomendasi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dari perspektif peserta pelatihan.

Ketiga, pengelolaan desa wisata tidak terlepas dari hambatan dan atau tantangan yang dihadapi oleh pengelola desa. Penelitian ini menguraikan kondisi kekinian desa wisata dan solusi (strategi) yang mungkin dapat ditempuh dalam rangka mencapai tujuan pengembangan desa wisata. Keempat, pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat perdesaan masih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam mengelola potensi desa melalui peran dan fungsi kelembagaan lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan tantangan atau hambatan pengelolaan desa wisata berdasarkan pandangan peserta pelatihan pariwisata; 2) mengusulkan strategi pengelolaan desa wisata dari perspektif teori kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi secara akademik mengenai pengembangan desa wisata dan wisata perdesaan. Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan (*institutional theory*) bahwa lembaga di suatu destinasi pariwisata akan dapat berjalan dengan baik melalui peran bersama dari *stakeholder* yang ada di perdesaan. Penelitian ini menguraikan strategi yang dapat ditempuh dalam pengelolaan desa wisata ataupun wisata perdesaan.

METODOLOGI

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dalam menganalisis fenomena pengelolaan desa wisata. Pada tanggal 6 Maret 2023, penulis menjadi bagian dari pelatihan dasar pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penulis menjadi fasilitator dalam kegiatan pelatihan tersebut. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pelatihan adalah para staf di sektor pemerintahan dalam lingkup provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota terkait. Melalui pelatihan ini, penulis menganalisis pandangan peserta pelatihan mengenai pengelolaan desa wisata. Pandangan peserta pelatihan merupakan gambaran dari pengalaman dan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan desa wisata di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap. Pertama, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring dan luring yang melibatkan peserta dan fasilitator. Penulis menggunakan data yang diperoleh secara daring dengan memanfaatkan fitur *live chat* pada aplikasi *WhatsApp*. Pada proses ini, penulis memberikan pertanyaan kepada para peserta yang tergabung dalam grup *WhatsApp*. Pertanyaan kepada peserta adalah sebagai berikut:

“Salah satu lembaga (organisasi) lokal yang berperan penting dalam pariwisata adalah kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pada faktanya, ada Pokdarwis yang berhasil, kurang berhasil atau cenderung maju mundur. Menurut Bapak/Ibu, mengapa suatu Pokdarwis berhasil dan tidak berhasil. Apa strategi pengelolaan Pokdarwis agar dapat berhasil. Silahkan tuliskan pendapat/pandangan Bapak/Ibu, Hatur nuhun”.

Pada tahap kedua, penulis (fasilitator) mencatat pandangan atau pendapat para peserta pelatihan dan menganalisis pandangan tersebut berdasarkan prinsip analisis data kualitatif. Pada tahap ketiga,

penulis menjadi fasilitator dalam pelatihan pariwisata dasar melalui materi dasar-dasar kelembagaan pariwisata secara daring (*zoom meeting*) dengan melibatkan seluruh peserta (9 Maret 2023). Pada tahap ini, penulis mengajak peserta pelatihan untuk berdiskusi mengenai kondisi pengelolaan desa wisata atau wisata perdesaan di Indonesia khususnya di daerah dimana mereka bekerja. Penulis menganalisis informasi yang disampaikan peserta pelatihan sebagai bagian dari data penelitian dalam rangka merumuskan strategi pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

Penulis menganalisis data penelitian berdasarkan prinsip analisis data kualitatif. Sarantakos (2013) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah interpretasi data secara menyeluruh untuk menghasilkan deskripsi dan eksplanasi logis terhadap suatu fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian. Proses analisis data melalui reduksi data, pengorganisasian dan interpretasi (Fielding & Fielding, 2008).

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Gambaran Umum Kegiatan Pelatihan Dasar Pariwisata dan Penggunaan Data Penelitian

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyelenggarakan kegiatan pelatihan pariwisata dasar bagi aparatur sipil Negara. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan skema pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi Jawa Barat adalah salah satu penyelenggara kegiatan pelatihan, Kemenparekraf menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 14 Maret 2023 dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pemberian materi pelatihan oleh fasilitator secara daring dan luring dan kunjungan lapangan ke desa wisata.

Peserta pelatihan pariwisata dasar adalah aparatur sipil Negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang kepariwisataan ataupun berkaitan dengan

pariwisata. Penelitian ini memanfaatkan informasi yang diberikan oleh peserta pelatihan selama kegiatan berlangsung. Data utama penelitian ini adalah jawaban peserta pelatihan tentang pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai topik yang sedang dibahas. Terdapat dua alasan urgensi data penelitian ini. Pertama, para peserta pelatihan adalah mereka yang bekerja di sektor pariwisata ataupun memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan desa wisata. Kedua, peserta pelatihan dikategorikan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah khususnya desa wisata. Informasi yang disampaikan oleh peserta pelatihan merupakan gambaran pengelolaan desa wisata di daerah sesuai dengan pengalaman peserta pelatihan.

Materi pelatihan dasar pariwisata terbagi atas sepuluh topik, yakni; kode etik pariwisata, pembangunan kepariwisataan nasional, dasar konsep kepariwisataan, pengetahuan dasar industri hospitalitas, pengetahuan dasar industri perjalanan, pengetahuan dasar industri konvensi dan *event*, pengetahuan dasar industri daya tarik wisata, dasar-dasar pemasaran pariwisata, dasar-dasar kelembagaan pariwisata, penggunaan teknologi informasi dalam kepariwisataan. Aktifitas pelatihan mencakup pembelajaran mandiri oleh peserta pelatihan, *live chat* melalui grup *WhatsApp*, sesi pembelajaran tatap muka (secara daring dan luring) dan studi lapangan.

Pada proses *live chat*, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dengan fasilitator (narasumber). Penulis adalah fasilitator untuk materi kelembagaan dengan pelaksanaan *live chat* dengan dua cara. Pertama, fasilitator mengajukan dua pertanyaan kepada para peserta dengan topik pengelolaan desa wisata. Kedua, fasilitator mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi sesuai dengan topik pelatihan. Pada proses pertama, peserta memberikan pandangan mengenai pengelolaan desa wisata sesuai dengan

pengetahuan dan pengalaman mereka. Selanjutnya, penulis menganalisis informasi peserta pelatihan sebagai bagian dari data kualitatif dalam penelitian ini.

3.2 Tantangan Pengelolaan Desa Wisata dalam perspektif Peserta Pelatihan Pariwisata

Pengelola desa wisata dihadapkan pada berbagai kondisi, situasi dan tantangan pengelolaan desa baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, masyarakat sebagai pelaku pariwisata akan menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan pengelolaan desa yang berkelanjutan. Faktor eksternal dapat pula mempengaruhi pengelolaan desa wisata. Penelitian ini menganalisis pandangan informan penelitian sekaligus sebagai *stakeholder* di tingkat kabupaten atau kota tentang tantangan (hambatan) pengelolaan desa wisata. Uraian mengenai tantangan pengelolaan desa wisata dalam penelitian ini adalah gambaran kondisi kekinian pengelolaan desa wisata dari sudut pandang pelaku pariwisata, pemerhati ataupun akademisi dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Tantangan pertama yang menjadi perhatian peserta pelatihan adalah konflik internal yang terjadi pada lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat. Terdapat potensi adanya konflik kepentingan di dalam pengelolaan suatu organisasi khususnya yang mengelola desa wisata. Informan menuliskan, “namun yang stagnan bahkan cenderung mundur dikarenakan terdapat konflik kepentingan dalam internal Pokdarwis itu sendiri, bahkan ada yang terpecah’ (*live chat*, Maret 2023). Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang konflik dalam organisasi Pokdarwis. Informan lain menyebutkan, “Pokdarwis tidak berkembang, karena adanya ketidak samaan visi sesama anggota, karena dalam kelompok harus satu visi, adapun hal –hal lainnya karena modal dan keterampilan serta ketidaksiapan dalam melaksanakan kegiatan” (Dy, *live chat*, Maret 2023). Kepentingan yang menyangkut keuntungan

yang didapatkan dapat menjadi salah satu alasan pemicu adanya konflik dalam suatu lembaga atau organisasi. Konflik internal juga dapat terjadi karena tidak adanya saling memahami mengenai fungsi dan tujuan organisasi. Perbedaan pendapat dapat memicu adanya konflik internal, apalagi jika tidak dibarengi dengan upaya untuk mencari solusi bersama terhadap masalah internal tersebut.

Sumber daya manusia di perdesaan masih menjadi tantangan bagi pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Sumber daya manusia yang masih kurang ini berdampak terhadap pengelolaan desa wisata dan kesadaran masyarakat. Informan menyatakan, ‘menurut saya (Pokdarwis) tidak berhasil dapat disebabkan beberapa faktor seperti kurang nya kualitas SDM, manajemen pengelolaan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan kepariwisataan masih rendah sehingga sulit untuk berkolaborasi dengan instansi kepariwisataan” (RH, *live chat*, Maret 2023). Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* memiliki kaitan dengan kualitas sumber daya manusia pengelola desa. Anggota msyarakat sebagai pengelola masih memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan desa wisata. Anggota masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan lokal belum sepenuhnya memiliki kemampuan mengelola potensi desa. Kondisi tersebut berdampak terhadap kemunduran pengelolaan desa wisata. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pariwisata masih menjadi realitas di perdesaan.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan dana dan fasilitas yang dimiliki oleh kelembagaan lokal. Anggaran atau dana adalah salah satu kunci keberhasilan pengelolaan kelembagaan. Terdapat Pokdarwis yang berhasil dalam pengelolaan desa wisata, sebaliknya, terdapat pula lembaga yang cenderung lambat bahkan kurang berhasil karena faktor pendanaan. Informan menyampaikan, “semua pokdarwis tidak memiliki pendanaan maupun fasilitas yang sama sehingga tidak menjamin seluruh

pokdarwis memiliki tingkat keberhasilan yang sama” (Ti, live chat, Maret 2023). Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu lembaga pariwisata akan sangat tergantung pada dana dan fasilitas yang tersedia. Anggota Pokdarwis telah mengupayakan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Namun, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam menjalankan program-program wisata perdesaan.

Tabel 1. Summari tantangan (hambatan) pengelolaan desa wisata dari perspektif peserta pelatihan pariwisata

No	Tantangan (hambatan)
1	Konflik internal kelembagaan dan ketidaksetaraan visi dan misi anggota
2	Rendahnya kualitas SDM, pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pariwisata
3	Keterbatasan dana/anggaran dan fasilitas
4	Legalitas (Perdes) pengelolaan kelembagaan lokal

Sumber: Penulis, 2023

Pengalaman peserta pelatihan mengenai pengelolaan desa wisata menunjukkan bahwa kelembagaan lokal cenderung saling mengharapkan satu sama lain. Anggota kelembagaan belum menunjukkan upaya kreatif untuk bergerak secara mandiri membangun desa wisata. Salah satu isu yang menjadi perhatian informan adalah ketidakpastian landasan hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kelembagaan lokal. Informan mengungkapkan, “pengalaman saya saat melaksanakan bimtek dengan Pokdarwis..., Pokdarwis tidak berhasil karena saling menunggu untuk bergerak, tidak ada kepastian dari desa terkait pembuatan Perdes sehingga mereka mau bergerak pun tidak ada landasannya, juga kesulitan anggaran” (Ra, live chat, Maret 2023). Legalitas suatu lembaga sangat dibutuhkan agar masyarakat sebagai anggota lembaga dapat merencanakan program pengelolaan desa. Dengan legalitas yang jelas, anggota Pokdarwis dapat bekerja dan menyusun program yang berdampak pula terhadap peluang mendapatkan anggaran. Kesulitan anggaran perlu diatasi dengan peraturan desa yang memberikan peluang kepada anggota kelembagaan lokal untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata.

3.3 Strategi Pengelolaan Desa Wisata

Penelitian ini menghasilkan strategi pengelolaan desa wisata yang didasarkan pada analisis pandangan peserta pelatihan (informan). Tabel 2 adalah ringkasan strategi yang dapat ditempuh oleh lembaga local dalam merespons tantangan dan hambatan pengelolaan desa wisata.

Tabel 2. Summari strategi pengelolaan desa wisata dari perspektif peserta pelatihan pariwisata

No	Usulan strategi
1	Inisiasi pembentukan kelembagaan lokal atau menunjang eksistensi Pokdarwis
2	Adanya tokoh yang menerapkan kepemimpinan lembaga yang efektif
3	Penguatan sinergi dari berbagai kelompok stakeholder pariwisata
4	Pengelolaan desa berdasarkan kebutuhan wisatawan
5	Kapasitas (kemampuan) anggota Pokdarwis dalam mengelola sumber daya pariwisata (<i>tourism resources</i>)

Sumber: Penulis, 2023

Strategi pengelolaan desa wisata berkaitan erat dengan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam mengelola lembaga. Potensi wisata di suatu desa perlu dikelola oleh masyarakat, namun perlu ditunjang dengan peran dan fungsi kelembagaan. Penelitian ini menekankan pentingnya organisasi atau lembaga lokal sebagai strategi membangun desa wisata atau wisata perdesaan. Penelitian ini menekankan pentingnya eksistensi kelembagaan lokal sebagai strategi pertama dalam pengelolaan desa wisata. Informan mengungkapkan pentingnya kelembagaan lokal dalam kepariwisataan,

“Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan (Ra, live chat, Maret 2023).

Strategi kedua dalam pengelolaan desa wisata adalah adanya tokoh yang menerapkan kepemimpinan yang baik dan profesional. Informan menyatakan, “kepemimpinan yang baik dan kuat sehingga

dapat memotivasi anggota dan membuat keputusan yang tepat” (SL, *live chat*, Maret 2023). Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Individu atau kelompok masyarakat yang menjadi tokoh penggerak dapat memotivasi anggota masyarakat untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang diharapkan. Pemimpin dalam kelembagaan lokal menjadi pendorong dalam proses pendampingan masyarakat mencapai tujuan bersama. Informan menyatakan,

“Pokdarwis yang berhasil membutuhkan kepemimpinan yang efektif, yang bisa menyatukan semua pandangan, menengahi perbedaan-perbedaan, serta menyusun rencana yang akan dilaksanakan bersama. Pada sebuah organisasi kemasyarakatan, adanya sosok pemimpin seperti itu cukup langka, karena itu menurut hemat saya dibutuhkan fasilitasi dari pemerintah untuk mencetak pemimpin-pemimpin seperti ini” (*live chat*, Maret 2023).

Pembinaan anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tidak terlepas dari peran tokoh penggerak dalam kelembagaan tersebut. Keputusan dalam menjalankan kegiatan pariwisata akan senantiasa mengikutkan peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, eksistensi kelembagaan lokal (misalnya, Pokdarwis) perlu ditunjang dengan kesediaan anggota masyarakat menjadi pemimpin dan tokoh penggerak masyarakat. Pemimpin dan penggerak tersebut adalah mereka yang memahami maksud dan tujuan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, terdapat upaya dari pemimpin untuk mendorong masyarakat mengelola desa mereka.

Strategi ketiga adalah sinergi yang baik dari berbagai kelompok *stakeholder* pariwisata. Informan menyatakan, “keberhasilan Pokdarwis tidak dapat dilakukan sendiri, perlu adanya dukungan dan peran serta dari perangkat desa,

pemerintah maupun pelaku usaha pariwisata. Jika tidak bisa bersinergi, akan sulit juga bagi pokdarwis untuk mengembangkan potensi pariwisata” (Ra, *live chat*, Maret 2023). Pokdarwis bukanlah satu-satunya *stakeholder* yang dapat mengembangkan desa wisata. *Stakeholder* internal dan eksternal akan menjadi bagian tak terpisahkan dari desa wisata. Pemerintah menjadi fasilitator sekaligus pendorong bagi masyarakat untuk mengelola potensi desa. Pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelembagaan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata. Informan menyatakan, “berhasil tidaknya Pokdarwis adalah ada dan tidaknya bimbingan pemerintah setempat, pemberian pelatihan dan ilmu dalam mengelola suatu wisata oleh Pokdarwis” (*live chat*, Maret 2023). Pemerintah berperan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pariwisata. Pelaku usaha tidak hanya masyarakat yang memberikan layanan wisata ke wisatawan, namun pelaku usaha pariwisata eksternal juga memiliki andil dalam pengelolaan desa wisata. Biro perjalanan dapat bersinergi dengan kelembagaan lokal dalam rangka membawa tamu ke desa wisata. Dengan kata lain, pengelola desa wisata menjalin mitra dengan industri pariwisata dalam rangka penerapan sinergi *stakeholder* pariwisata.

Pengelolaan desa wisata dengan memperhatikan faktor kebutuhan wisatawan adalah strategi penting dalam menarik kunjungan wisatawan. Strategi keempat ini akan berkaitan dengan kemampuan anggota Pokdarwis mengelola produk pariwisata perdesaan yang bernilai jual sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat di perdesaan. Informan menyatakan,

“keberhasilan atau kegagalan suatu Pokdarwis dipengaruhi oleh banyak faktor dan kunci utamanya adalah kemampuan pengelola dalam mengelola tempat wisata tersebut. Jika pengelola mampu mengelola dengan baik dan memenuhi kebutuhan

wisatawan, maka kemungkinan besar Pokdarwis akan berhasil. Namun, jika pengelola tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan atau tidak mampu mengelola dengan baik, maka Pokdarwis berpotensi gagal” (Fa, *live chat*, Maret 2023).

Kelembagaan lokal perlu memahami pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada di perdesaan. Desa memiliki sumber daya pariwisata (*tourism resources*) berbasis alam, budaya dan buatan. Kapasitas atau kemampuan anggota Pokdarwis dalam mengelola sumber daya tersebut dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata. Kelembagaan lokal dapat menjalankan strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (Ela, *live chat*, Maret 2023); 1) mengembangkan rencana strategis dan rencana bisnis; 2) mengembangkan produk wisata yang berkualitas; 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM); 4) mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait; 5) memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya; serta 6) melakukan promosi dan pemasaran secara efektif. Kelembagaan lokal dapat memanfaatkan teknologi dalam rangka memasarkan produk pariwisata perdesaan. Anggota Pokdarwis yang memiliki kapasitas dalam memanfaatkan teknologi kebaruan dalam rangka implementasi pemasaran adalah upaya untuk memperkenalkan produk pariwisata.

Strategi kelima adalah peran anggota Pokdarwis dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Informan secara khusus, mengusulkan pentingnya pelaksanaan kegiatan (*event*) dalam rangka menarik kunjungan wisatawan. Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan program-program kepariwisataan dapat menjadi strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Informan menyatakan, ‘menurut saya baiknya pokdarwis selalu merawat dan mengelola destinasi wisata agar tetap menarik mungkin bisa mencari kolaborasi entah dari brand

tertentu/UMKM/ lainnya untuk mengadakan beberapa *event* seperti *event* pameran/kuliner/musik dengan mengundang bintang tamu dan menambah beberapa arena serta menambah spot foto untuk menarik wisatawan” (Mi, *live chat*, Maret 2023). Pengelolaan daya tarik yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan Pokdarwis untuk mempertahankan wisata perdesaan. Inovasi dari pengelola dapat berupa pembuatan spot foto di destinasi pariwisata.

3.4 Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengembangan Institutional Theory

Penelitian ini telah menguraikan tantangan dan strategi pengelolaan desa wisata dari perspektif peserta pelatihan pariwisata. Pariwisata merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik secara internal dari suatu lembaga lokal maupun secara eksternal. Penelitian ini mengembangkan prinsip teori institusi bahwa sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat akan saling berkaitan dengan berbagai faktor lainnya. Tantangan pengelolaan desa wisata oleh Pokdarwis sebagaimana diuraikan oleh informan menunjukkan adanya saling ketergantungan terhadap berbagai faktor. Pandangan *stakeholder* yang beragam yang tidak mengarah pada satu tujuan pencapaian organisasi dapat menjadi hambatan dalam mengelola potensi desa untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaan desa wisata atau wisata perdesaan tidak hanya melibatkan satu kelompok *stakeholder*, namun beragam *stakeholder* dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

Kelembagaan lokal dapat menerapkan strategi pengelolaan desa wisata berdasarkan kemampuan lembaga bekerja secara rasional. Teori institusi berakar dari pentingnya mempertimbangkan alasan yang logis dalam menentukan suatu upaya atau strategi. Penelitian ini menghasilkan strategi pengelolaan desa wisata berdasarkan cara pandang peserta pelatihan sebagai informan. Informan memberikan argumentasi strategi yang dapat ditempuh dalam mencapai

sasaran dan tujuan pembanguna pariwisata perdesaan. Desa wisata dan wisata perdesaan adalah jenis wisata yang pengelolaannya perlu pertimbangan secara rasional. Partisipasi anggota masyarakat dalam pengelolaan desa adalah karena peran dan fungsi kelembagaan local yang bekerja dengan pertimbangan logis. Dengan kata lain, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya teori kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata dan wisata perdesaan.

Strategi kelembagaan dalam menerapkan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan perlu ditunjang dengan penyusunan mekanisme perencanaan pariwisata perdesaan. Teori kelembagaan mendorong *stakeholder* untuk merencanakan dan menyusun program berdasarkan mekanisme yang telah dibangun. Secara praktis, penelitian ini mengusulkan mekanisme yang dapat dijalankan oleh *stakeholder* internal dan eksternal untuk mengelola desa wisata. Perencanaan yang baik dapat mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang diharapkan (Hizmi et al., 2022). Eksistensi Pokdarwis sebagai lokal dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di perdesaan jika penyusunan mekanisme kerja melibatkan masyarakat secara optimal. Panduan yang dituangkan dalam bentuk standar prosedur pengelolaan organisasi dan implementasi pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk nyata dari teori institusi. Penelitian ini mendukung teori institusi sebagai instrumen penting dalam mengoptimalkan peran lembaga lokal sebagai fasilitas pembangunan pariwisata.

Penelitian ini menguraikan tantangan dan atau hambatan yang dirasakan/dialami oleh *stakeholder* pariwisata. Meskipun peserta pelatihan sebagai informan memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda dalam hal desa wisata atau wisata perdesaan, pendapat mereka dapat menjadi representasi realita desa wisata di Indonesia khususnya di destinasi dimana informan bekerja. Interaksi yang terjalin antara peserta pelatihan dan anggota Pokdarwis dapat memperkuat

argument peserta pelatihan dalam menilai kemajuan dan kemunduran desa wisata. Interaksi yang terbangun tersebut merupakan sistem sosial, bagian dari prinsip-prinsip teori institusi. Karena itu, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kepariwisataan melibatkan manusia yang berinteraksi dalam rangka menghasilkan gagasan konseptual pembangunan kepariwisataan.

KESIMPULAN

Pelatihan pariwisata untuk *stakeholder* pariwisata merupakan salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia. Peserta pelatihan adalah salah satu *stakeholder* di destinasi pariwisata dan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan dan pengembangan desa wisata dan wisata perdesaan. Penelitian ini telah mengidentifikasi tantangan pengelolaan desa wisata dari perspektif peserta pelatihan pariwisata. Pandangan mereka mengenai strategi mengoptimalkan peran lembaga lokal adalah bentuk perhatian dan berkontribusi terhadap upaya Pokdarwis mengelola desa wisata. Idealnya, pengelola desa wisata merupakan informan yang valid dan paling ideal dalam memberikan pandangan mengenai pengelolaan desa wisata. Namun demikian, peserta pelatihan pariwisata telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan desa wisata dan wisata perdesaan. Karena itu, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dari informan yang valid dan mengetahui kondisi aktual pengelolaan desa wisata.

Institutional theory (teori institusi/kelembagaan) memandang pentingnya peran bersama dari setiap anggota masyarakat, tidak tergantung pada organisasi lokal di destinasi pariwisata. Lembaga lokal yang paling dekat peran dan kedudukannya dalam membangun desa wisata adalah kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Temuan dalam penelitian ini memperkuat teori institusi dalam konteks pariwisata perdesaan. Pandangan peserta pelatihan sangat penting dalam memahami

kondisi kekinian pengelolaan desa wisata. Karena itu, penelitian ini berkontribusi terhadap kajian literatur kepariwisataan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata dalam kerangka teori kelembagaan dan pandangan peserta pelatihan pariwisata.

Terdapat Pokdarwis yang berhasil menjalankan perannya sebagai organisasi kepariwisataan di tingkat lokal, namun terdapat pula yang harus berupaya bangkit dan mengatasi berbagai tantangan pengelolaan desa wisata. Pokdarwis dapat berjalan efektif jika ditunjang dengan pengelola yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan hambatan secara internal dan eksternal. Rencana tindakan dan strategi dari Pokdarwis merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan dimana pariwisata dan lembaga lokal adalah suatu sistem sosial yang dibangun secara bersama untuk kemajuan masyarakat di perdesaan. Penguatan peran Pokdarwis sebagai institusi di tingkat perdesaan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, industri pariwisata dan masyarakat.

Studi tentang pengelolaan desa wisata perlu didukung dengan data statistik. Penelitian ini hanya memanfaatkan data-data kualitatif. Karena itu, analisis wisata perdesaan perlu diperkuat dengan data kuantitatif ataupun penguatan analisis melalui metode mixed-methods.

REFERENSI

- Amir, A. ., Ghapar, A. ., Jamal, S. ., & Ahmad, K. . (2015). Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *168*, 116–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.217>
- Andriani, D. ., & Sunarta, I. . (2015). Pengelolaan desa wisata Belimbing menuju pariwisata berkelanjutan kecamatan Pupuan, kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, *3*(1), 17–23.
- Carneiro, M. ., Lima, J., & Silva, A. . (2015). Landscape and the rural tourism experience: Identifying key elements, addressing potential, and implications for the future. *Journal of Sustainable Tourism*, *23*(8–9), 1217–1235. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1037840>
- Cavaliere, C. . (2017). Foodscapes as alternate ways of knowing: Advancing sustainability and climate consciousness through tactile space. In S. L. Slocum & C. Kline (Eds.), *Linking urban and rural tourism: Strategies in sustainability* (pp. 49-). CABI.
- Duffy, L., & Kim, G. (2017). Addressing power: Stakeholder involvement within an integrated tourism planning process. In S. L. Slocum & C. Kline (Eds.), *Linking urban and rural tourism: Strategies in sustainability* (pp. 33–48). CABI.
- Elliott, S., & Smith, G. (2005). Curriculum theory and practice: A case in online education. In D. Airey & J. Tribe (Eds.), *An International Handbook of Tourism Education* (pp. 61–76). Elsevier.
- Falaster, C., Zanin, L., & Guerrazzi, L. (2017). Institutional theory in tourism research: New opportunities from an evolving theory. *Revista Brasileira de Pesquisa Em Turismo*, *11*, 270. <https://doi.org/10.7784/rbtur.v11i2.1310>
- Fielding, J., & Fielding, N. (2008). Synergy and synthesis: Integarting qualitative and quantitative data. In A. Pertti, B. Leonard, & B. Julia (Eds.), *The SAGE handbook of social research methods* (pp. 555–571). SAGE.
- Guaita Martínez, J. ., Martín Martín, J. ., Salinas Fernández, J. ., & Mogorrón-Guerrero, H. (2019). An analysis of the stability of rural tourism as a desired condition for sustainable tourism. *Journal of Business Research*, *100*,

- 165–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.033>
- Guerrero, G. . (2008). Rural tourism in the context of ejidos and community development in Mexico. In P. M. Burns & M. Novelli (Eds.), *Tourism development: Growth, myths and inequalities* (pp. 259–271). CABI.
- Hall, D, Mitchell, M., & Roberts, L. (2016). Tourism and the countryside: Dynamic relationships. In Derek Hall, L. Roberts, & M. Mitchell (Eds.), *New directions in rural tourism* (pp. 3–18). Routledge.
- Hall, M. (2003). Institutional arrangements for ecotourism policy. In D. A. Fennell and R. K. Dowling (Ed.), *Ecotourism policy and planning* (pp. 21–38). CABI.
- Hizmi, S., Wijaya, S. ., & Nawawi. (2022). The role of quality human capital and planning strategies in achieving event sustainability in Lombok. *Journal of Mandalika Review*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.55701/mandalika.v1i1.1>
- Ingadijaya, R., & Bilqis, L. D. . (2020). Peningkatan kapasitas kelompok penggerak pariwisata dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Cipasung, kabupaten kuningan. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 2(2), 89–96.
<https://doi.org/10.30647/jpp.v2i2.1436>
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189.
<https://doi.org/10.1080/09669580802495741>
- Junaid, I, & M. Salim, M. . (2019). Peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan desa wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.6>
- Junaid, I. (2021). Community empowerment strategy for economic opportunities in Selayar Islands regency, South Sulawesi. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(1), 72–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V34I12021.72-80>
- Junaid, I, Dewi, W., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan desa wisata berkelanjutan: Studi kasus di desa Paccekke, kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 287–301.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Lomine, L. (2002). Online learning and teaching in hospitality, leisure, sport and tourism: Myths, opportunities and challenges. *Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education*, 1.
<https://doi.org/10.3794/johlste.11.13>
- Mumtaz, A. ., & Karmilah, M. (2021). Digitalisasi wisata di desa wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19790>
- Noho, Y. (2014). Kapasitas pengelolaan desa wisata religius Bongo kabupaten Gorontalo. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 6(1), 8–20.
https://doi.org/https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6872/5376
- Paskasari, C. ., Guntoro, B., & Witjaksono, R. (2020). Kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata Brajan kabupaten Sleman. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(1), 12–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpt.48259>
- Prafitri, G., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata (studi kasus: Desa wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4, 76.

- <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
Pramusita, A., & Sarinastiti, E. (2018). Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata Pantai Trisik, Kulonprogo. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 2, 14.
<https://doi.org/10.22146/jpt.35378>
- Prayogi, P. ., Suthanaya, I. P. ., Komang, N. ., & Sari, J. . (2022). Pengelolaan desa wisata Pengelipuran dengan konsep green economy berbasis masyarakat lokal di era Pandemi Covid-19. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 3(2), 117–127.
<http://jamas.triatmamulya.ac.id/>
- Sarantakos, S. (2013). *Social research* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Scott, W. (2005). *Institutional theory: Contributing to a theoretical research program*.
- Scott, W. . (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. SAGE Publications Ltd.
- Sharpley, R. (2016). Rural tourism and sustainability- A critique. In D Hall, L. Roberts, & M. Mitchell (Eds.), *New directions in rural tourism* (pp. 38–53). Routledge.
- Sitorus, N. I. B. (2020). Peran dan kolaborasi stakeholder pariwisata dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata di kawasan Danau Toba. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 6(2), 83–92.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jhp.v6i2.2416.g1896>
- Soares, A. L. ., Mendes-Filho, L., & Gretzel, U. (2021). Technology adoption in hotels: Applying institutional theory to tourism. *Tourism Review*, 76(3), 669–680.
<https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0153>
- Su, M. M., Wall, G., Wang, Y., & Jin, M. (2019). Livelihood sustainability in a rural tourism destination - Hetu Town, Anhui Province, China. *Tourism Management*, 71, 272–281.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.019>
- Yang, J., Yang, R., Chen, M.-H., Su, C.-H., Zhi, Y., & Xi, J. (2021). Effects of rural revitalization on rural tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47, 35–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.02.008>